

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Koperasi

Secara umum koperasi dapat diartikan sebagai salah satu usaha masyarakat untuk memajukan taraf hidup dengan cara saling tolong-menolong. Sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Sementara menurut Samuel dan Conie (2020), pada awalnya koperasi merupakan perkumpulan masyarakat dengan tingkat ekonomi cukup rendah yang mana memiliki tujuan untuk menyejahterakan kehidupan secara bersama-sama. Semakin berjalannya waktu dan sesuai dengan sifat bangsa Indonesia yaitu gotong royong dan kekeluargaan sebagai cerminan atas nilai luhur Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, koperasi saat ini berkembang diseluruh kalangan masyarakat. Sehingga berdasarkan pengertian koperasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan sebuah badan usaha yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

2.2 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan informasi terkait dengan perkembangan suatu entitas pada periode tertentu yang mana informasi tersebut merupakan bahan pertanggungjawaban perusahaan dan akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Informasi yang dilampirkan pada laporan keuangan berupa transaksi-transaksi yang terjadi selama satu tahun buku entitas terkait serta catatan pendukungnya. Transaksi tersebut menjadi refleksi atas penyajian arus kas perusahaan, posisi keuangan perusahaan serta perubahannya, dan posisi kinerja yang dapat dibandingkan dari tahun ke tahun.

2.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

Di Indonesia terdapat standar-standar yang dibentuk untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Standar ini disusun dengan memperhatikan kriteria-kriteria tertentu sehingga entitas dapat menyesuaikan dengan karakteristik dari usahanya. Salah satu standar yang berlaku adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). SAK ETAP digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Terdapat dua tolok ukur yang menentukan suatu entitas tidak memiliki akuntabilitas publik, yaitu:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Suatu entitas dapat dikatakan memiliki akuntabilitas signifikan, apabila:

- a. Entitas telah mengajukan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pendaftaran pada otoritas pasar modal yang bertujuan untuk penerbitan efek di pasar modal.
 - b. Entitas menguasai aset dalam suatu kapasitas tertentu untuk sekelompok orang seperti entitas asuransi, bank, dana pensiun sebagai fidusia.
2. Laporan keuangan yang diterbitkan memiliki tujuan berupa tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pihak eksternal. Pihak eksternal tersebut adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Dikutip dari Aditya dan Nur (2014), hadirnya SAK ETAP ini diharapkan dapat memudahkan entitas dalam menyajikan laporan keuangan dan mampu mengatasi permasalahan internal yang kebanyakan hanya melihat hasil laba tanpa memperhatikan posisi keuangan perusahaan.

2.3.1 Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP

Laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP disajikan dengan wajar baik posisi keuangan, kinerja keuangan, maupun arus kas suatu entitas. Wajar disini berarti penyajian atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi-kondisi yang sesuai dengan pengertian dan karakteristik aset, kewajiban, penghasilan, dan beban harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan SAK ETAP adalah:

1. Neraca

Sebagaimana penjelasan pada SAK ETAP, neraca menyajikan informasi terkait dengan aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu entitas pada akhir tahun

pelaporan. Informasi tersebut setidaknya terdiri dari pos-pos seperti kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Namun SAK ETAP tidak memberikan urutan tertentu terhadap pos-pos yang akan disajikan, hal ini mencerminkan SAK ETAP memberikan fleksibilitas dalam menyusun neraca sesuai dengan kebijakan entitas terkait.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan kinerja keuangan dari suatu entitas selama satu periode pelaporan. SAK ETAP menjelaskan bahwa laporan laba rugi menyajikan semua pos terkait dengan penghasilan dan beban, yang setidaknya memuat pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas, beban pajak, dan laba atau rugi neto.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi yang terjadi pada suatu periode, sehingga pendapatan dan beban diperoleh dari laporan laba rugi untuk periode terkait. Informasi yang disajikan pada LPE adalah laba atau rugi untuk periode, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik entitas.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi atas perubahan historis yang terjadi terhadap kas dan setara kas entitas yang dirinci terpisah melalui perubahan yang terjadi pada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan selama periode tersebut.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan pendukung yang dibutuhkan dalam penyajian laporan keuangan. Umumnya urutan dalam penyajian catatan atas laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP adalah pernyataan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan SAK ETAP, ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan, informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, dan pengungkapan lainnya.